

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Ahmad Miru. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- A. Qirom Syamsuddin Meliala. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2005). *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Krisna, Harahap. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Grafiti Budi Utami.
- Oemar Moeachtar. (2017). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Subekti dan Tjiptosudibio. (1974). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Paramita.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Cetakan ke-III Pradnya Paramita.
- Salim, H.S. (2010). *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H.S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta.
- Salim, H.S. (2016). *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Salim Hs. (2015). *Teknik Pembuatan Suatu Akta Konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Surabaya: CV Mandar Maju.
- Subekti. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Arga Printing
- Sudikno Mertokusumo. (1990). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Supriadi. (2006). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Utrecht. (1959). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Pt Penerbit Balai Buku Ikhtiar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

JURNAL

Aprilia Putri. (2018). *Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik*. Vol. 5 (No. 1).

Audrey Bintang Silado. (2023). *Upaya Hukum terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah*. UNES LAW REVIEW, Vol. 6 (No. 2).

Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, Fauzi Hidayat. (2023). *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*. Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16, No. 1.

I Gusti Bagus Yoga Prawira. (2016). *Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah*. Jurnal IUS, Vol. IV.

Kunni Afifah. (2017). *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya*. Lex Renaissance, Vol. 2, No. 1. Hlm 148.

Maygi Angga Siswantoro, Sri Astutik, dan Subekti. (2024). *Tanggung Jawab Notaris atas Penyerahan Sertifikat Tanah tanpa Kata Sepakat Para Pihak*. Desentralisasi, Vol. 1, No. 3.

Sihombing, Hera Vanesa. (2023). *Notaris sebagai Pihak Turut Tergugat dengan Akta yang Dibuatnya Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 825/PDT.G/2018/PN.MDN TGL 15 Oktober 2019 dan No. 575/PDT.G/2018/PN.MDN TGL 13 Maret 2019*. Jurnal Media Akademik,

Vol. 2.

Rosadi, Aulia Gumilang. (2020). *Tanggung Jawab Notaris dalam Sengketa Para Pihak terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuatnya*. Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5.

Lubis, Taufik Hidayat. (2021). *Kekeliruan Menarik Notaris sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan*. Jurnal SiNTESa.

INTERNET

Renata Christina Auli. (2024). Hukum Online: *Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/> diakses pada 00.07 WIB tanggal 6 September 2025.

